

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang dan berupaya menjadi negara yang maju. Dengan demikian berbagai perbaikan dilaksanakan di negara ini. Tidak ketinggalan tata Kelola pemerintah terus ditingkatkan dari struktur organisasi, anggaran serta laporan keuangan di masing-masing daerah. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi, keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Dengan mewujudkan visi negara tersebut pemerintah terus memperbaiki tata Kelola yang baik, dengan terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelola laporan keuangan daerah. Pengelolaan laporan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis meliputi bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah dan peningkatan sumber daya manusia.

Menurut media kontan data Badan Pemeriksa Keuangan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat 2020. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, meski memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), lembaganya menemukan sejumlah temuan masalah yang bisa berujung pada kerugian negara. Permasalahan itu terdiri dari 28 persen kelemahan system, 29 persen ketidakpatuhan, dan 43 persen ketidakhematan, ketidakefienan, hingga ketidakefektifan. Menurut media kontan, terdapat permasalahan yaitu pelaporan beberapa transaksi pajak yang belum lengkap menyajikan hak negara sebesar Rp.21,57 triliun, realisasi pembiayaan dan pemindahbkuan dari rekening bendahara umum negara (BUN) berupa dana abadi penelitian, kebudayaan dan perguruan tinggi sebesar Rp.8,99 triliun di titipkan kepada rekening badan layanan umum lembaga pengelola dana pendidikan karena pengaturan terkaait pengelolaan dana tersebut belum ditetapkan. Atas permasalahan-permasalahan

tersebut BPK memberikan saran kepada pemerintah untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang untuk ditindak lanjuti.

PSAK 1 (2015) menyebutkan laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta meteri penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Pada kesimpulannya pengertian laporan keuangan adalah dokumen yang memberikan informasi pencatatan dari segala transaksi yang berkaitan dengan uang, pembelian dan penjualan serta kredit. Laporan keuangan juga berfungsi untuk mengetahui keadaan finansial perusahaan, sehingga laporan yang dibuat dapat secara detail, tepat dan perhitungan yang baik.

Anshori (2012) menegaskan bahwa penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu merupakan hal yang paling penting dalam pemerintahan. Apabila informasi tersedia dalam waktu yang lama, maka informasi tersebut tidak mempunyai nilai lagi dikarenakan ketepatan waktu itu informasi tersedia tepat waktu bagi pengambilan keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil.

Winidyaningrum (2010) mengemukakan bahwa kemampuan seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan sesuatu peralatan, berkomunikasi efektif atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis. Nihayah (2015) mengatakan bahwa aset organisasi yang paling penting dan harus di perhatikan oleh manajemen adalah sumber daya manusia (*human resources*). Menurut Anshori (2012) sumber daya manusia merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan bekal pengalaman, pendidikan, dan pelatihan. Dalam mewujudkan kualitas informasi pelaporan keuangan yang baik, maka diperlukan sumber daya manusia dalam memahami akuntansi.

Basuki dkk., (2011) mengemukakan bahwa teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*) database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer

(*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang mungkin manusia tidak mampu melakukannya.

Wadani & Andriyani (2017) menyebutkan pemanfaatan adalah perilaku karyawan teknologi dalam tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang di tambah atau dikurangi dalam arti lain pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal.

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 dalam Basuki dkk., (2011) tentang sistem pengendalian intern pemerintah bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Maisyuri & Syamsidar (2016) pengawasan intern adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer puncak dan atau pimpinan atau manajer unit atau satuan kerja dilingkungan organisasi dan atau satuan kerja masing-masing. Pengendalian intern dilingkungan sektor publik mempunyai sifat yang khusus. Organisasi pemerintah dikelola dengan cara dan nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan sektor privat. Karena ciri utama dalam pengelolaan kegiatan sektor publik adalah ketaatan dalam melaksanakan anggaran.

Menurut Maharani & Agustin (2021) pegawai yang memiliki komitmen organisasi akan bekerja keras dengan dedikasi tinggi karena mereka menganggap bahwa pencapaian tujuan organisasi merupakan hal yang penting. Pegawai yang

memiliki komitmen organisasi yang tinggi memiliki pandangan yang positif dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi, hal ini membuat seorang pegawai memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab lebih demi keberhasilan organisasi. Komitmen organisasi adalah kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai organisasi, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, keinginan kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi Ilmi (2020a).

Hasil penelitian Arighi & Darwanis (2020), menunjukkan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan desa di Kabupaten Aceh. Penelitian Maisyuri & Syamsidar (2016) menunjukkan sistem pengendalian internal pemerintah, dan kualitas sumber daya manusia, berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pada pemerintahan kota lhoksemawe. Penelitian Yustanti & Susanti (2020) menunjukkan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi Bengkulu. Penelitian Kurniawati dkk., (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menindak lanjuti hasil BPK dan penemuan masalah dalam pemerintahan Kota Bekasi tersebut maka peneliti perlu mengkaji secara mendalam pada salah satu pemerintahan di Kota Bekasi. Pengkajian dilakukan sebatas ingin mengetahui beberapa penyebab lemahnya ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi beberapa aspek berikut antara lain sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi. Penelitian ini merupakan modifikasi dari Hermayanthi dkk., (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian yang digunakan. Objek yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu koperasi simpan pinjam di Kabupaten Buleleng sedangkan objek penelitian ini yaitu SKPD kota Bekasi. Dengan adanya fenomena dan penelitian terdahulu diatas maka peneliti mengangkat judul:

“Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem pengendalian intern, dan Komitmen Informasi terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan?
1. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian inter berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan.
2. Untukmenguji pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan.
3. Untukmenguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan.
4. Untukmengujiengaruh komitmen organisasi terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan.

Adapun manfaat penelitian ini :

1. Bagi Praktisi
Melalui hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Daerah akan memperoleh sumbangan pemikiran tentang seberapa pentingkah sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan komitmen organisasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan referensi dan bahanperbandingan untuk memahami hubungan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan komitmen organisasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 bab, dengan rincian:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan dari analisis penelitian dan pembahasan tentang permasalahan penelitian melalui gambaran umum objek penelitian, pengujian statistik, dan interpretasi hasil penelitian yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menyajikan simpulan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan memuat saran yang di tunjuk untuk peneliti sebelumnya yang akan meneliti dengan topik yang sama atau mengembangkan penelitian yang telah dilakukan agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik.

